

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan bagian dari dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam memajukan pembangunan. Peranan dalam pembangunan, usaha kecil haruslah terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran.

Definisi usaha kecil sampai saat ini berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang yang mengartikan. Ada yang mengartikan usaha kecil dari sudut pandang modal, omset tahunan, bahkan ada juga yang mendefinisikan dari sudut pandang tenaga kerja, tapi pada prinsipnya sama.

M. Tohar (2007:1) mendefinisikan perusahaan kecil adalah sebagai berikut :

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sedangkan M. Daini Tara (2007:50) memberikan batasan usaha kecil sebagai berikut :

Usaha kecil adalah kelompok usaha industri yang memiliki investasi peralatan dibawah tujuh juta rupiah, investasi pertega kerja maksimal enam

ratus dua puluh ribu rupiah, jumlah tenaga kerja 20 orang, serta memiliki aset perusahaan tidak lebih dari seratus juta rupiah.

Menurut Undang-Undang RI No.20 Tahun 2008 yang dimaksud usaha kecil sebagai berikut :

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang ini.

Dan untuk mempermudah pembinaan usaha kecil, maka ditetapkan juga kriteria perusahaan kecil yaitu (UU RI No. 20 Tahun 2008) :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) samapai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS) Keputusan Menteri Keuangan 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008 defenisi usaha kecil adalah :

Usaha Kecil identik dengan industry kecil dan industry rumah tangga.

BPS mengklasifikasikan industry berdasarkan jumlah pekerjaanya, yaitu:

- 1) Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang.

- 2) Industri kecil dengan pekerja 20-99 orang.
- 3) Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang.
- 4) Industri besar dengan pekerja 100 orang lebih.

2. Konsep dan Prinsip Dasar Akuntansi

Ilmu akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan. Dengan demikian apabila perusahaan menggunakan ilmu akuntansi yang baik, maka dapat menyediakan informasi yang baik, yang dapat dipergunakan oleh pihak intern maupun pihak ekstern dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pengertian akuntansi menurut *American institute certified of public accounting* (AICPA) dalam Ahmad Riahi Belkaoui (2006:50) adalah sebagai berikut :

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Menurut *American Accounting Assosiation* dalam Dwi Harti (2009:4) mendefinisikan Akuntansi sebagai berikut :

Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi.

Dan definisi diatas dapat dilihat, bahwa dalam pengertian akuntansi termasuk fungsi “pencatatan” disamping fungsi-fungsi lainnya, begitu pula dengan akuntansi didalam definisi tersebut diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang begitu luas dari teknik-teknik pencatatan semata.

Soemarso S. R (2009;3-4) menyatakan bahwa tujuan utama dari akuntansi adalah :

menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan hasil dari proses akuntansi yang berbentuk laporan keuangan diharapkan dapat membantu para pemakai informasi keuangan.

Menurut Rudianto (2009:20) terdapat beberapa hal yang menjadikan konsep dasar dan melandasi struktur akuntansi adalah :

- a. Kesatuan usaha khusus (*economis entity*)
Suatu perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang terpisah dengan pemiliknya serta unit bisnis lainnya atau memisahkan transaksi usaha dengan transaksi personal yang dilakukan pemilik.
- b. Dasar pencatatan
Dasar pencatatan akuntansi yang dipakai dalam mencatat transaksi yaitu :
Akuntansi berbasis kas (*cash basis accounting*) adalah suatu metode perbandingan antara pendapatan dengan beban, dimana pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan beban dilaporkan pada saat uang telah dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual (*accrual basis accounting*) adalah suatu metode penandingan antara pendapatan dengan beban, dimana pendapatan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi dan beban dilaporkan pada saat beban tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha.
- c. Konsep Periode waktu (*time period*)

Perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka panjang, tetapi dalam proses pelaporan informasi keuangan, seluruh aktivitas perusahaan dalam jangka panjang dibagi menjadi periode-periode aktivitas didalam jangka waktu tertentu. Penyajian informasi keuangan kedalam periode waktu tersebut adalah untuk memberikan batasan aktivitas dalam waktu tertentu.

- d. Kontinuitas Usaha (*going concern*)
Suatu perusahaan dianggap akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dimasa mendatang.
- e. Penggunaan Unit Moneter (*monetary unit*)
Beberapa pencatatan dalam akuntansi dapat menggunakan unit fisik atau satuan yang lain didalam pencatatannya. Tetapi karena tidak semua aktivitas dapat menggunakan satuan yang sama, maka akuntansi menggunakan satuan moneter sebagai dasar pelaporannya.

Empat prinsip dasar akuntansi (*principle of accounting*) yang digunakan untuk mencatat transaksi menurut Donald E. Kieso, dkk (2008:45) adalah :

1. Prinsip biaya historis (*historical cost*)
Secara umum pengguna laporan keuangan lebih memilih menggunakan biaya historis karna memberikan tolak ukur yang dapat dipercaya untuk mengukur tren historis. Pada mulanya biaya historis sama dengan nilai wajar. Dalam periode selanjutnya ketika kondisi pasar dan ekonomi berubah maka biaya historis dan nilai wajarnya sering berbeda. Akibatnya ukuran atau estimasi nilai wajar lebih sering untuk pencatatan dan pelaporan informasi karena lebih relevan.
2. Prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition principle*)
Pendapatan umumnya diakui jika :
 - a) Telah direalisasi atau dapat direalisasi (*realized*), jika produk barang dan jasa atau aktiva lainnya telah ditukarkan dengan kas.
 - b) Pendapatan telah dihasilkan (*earned*), apabila sebuah entitas telah melakukan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang direpresentasikan oleh pendapatan.
3. Prinsip penandingan (*matching principle*)
Prinsip penandingan yaitu prinsip yang menandingkan beban dan pendapatan sepanjang rasional dan dapat diterapkan.
4. Prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure principle*)
Mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian *trade - of* penilaian. *Trade - of* ini terjadi antara kebutuhan untuk mengungkapkan secara cukup terperinci hal-hal yang akan mempengaruhi keputusan pemakai dan kebutuhan untuk memadatkan penyajian agar informasi dapat dipahami.

3. Tahap-Tahap dalam Siklus Akuntansi

Soemarso S.R (2009:90) memberikan pengertian siklus akuntansi adalah :

Tahap-tahap kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya.

Proses pencatatan dalam akuntansi sering disebut dengan pembukuan. Secara lengkap, proses atau siklus akuntansi meliputi : indentifikas transaksi, pencatatan transaksi dalam jurnal, posting transaksi, penyusunan neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Identifikasi Transaksi

Langkah pertama dalam siklus atau proses akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi, Menurut Donald E. Kieso dan Jerry J. Weygandt (2007:93) transaksi sebagai berikut :

Suatu kejadian eksternal yang melibatkan transfer atau pertukaran dimana dua kesatuan atau lebih.

Sedangkan Warren (2008:18) memberikan defenisi transaksi sebagai berikut:

kejadian atau kondisi ekonomi yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi suatu entitas.

Dari pengertian transaksi tersebut dapat diketahui transaksi merupakan penyebab awal adanya pencatatan karena pencatatan yang dilakukan dalam akuntansi merupakan pencatatan yang didasarkan pada bukti transaksi.

b) Pencatatan Transaksi Kedalam Jurnal

Setelah informasi transaksi yang terdapat dalam dokumen sumber dikumpulkan dan dianalisis, kemudian dicatat sebagai kronologis didalam buku jurnal. Dengan demikian jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi.

Definisi jurnal menurut Mamik Krisdiartiwi (2008 : 20) adalah :

Jurnal adalah buku *accounting* yang menjadi tempat pembukuan pertama dari transaksi-transaksi usaha dan kejadian-kejadian.

c) Posting transaksi

Posting adalah pencatatan transaksi dari jurnal kedalam rekening-rekening yang terkait. Posting transaksi pada dasarnya mengumpulkan item-item transaksi yang sama kedalam suatu tempat yang disebut dengan rekening pembukuan. Rekening pembukuan dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu rekening buku besar (*general ledger*) dan rekening buku pembantu (*subsidiary ledger*).

Menurut Donald E.Kieso, Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield (2007:76)

Buku besar adalah :

kumpulan dari semua akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pemegang saham, pendapatan dan beban.

Menurut Rahman Pura (2013:45) pada dasarnya buku besar dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Bentuk skontro, disebut juga bentuk dua kolom dan bentuk T, yaitu sebelah-menyebelah, sisi kiri disebut debit dan sisi kanan disebut kredit.
2. Bentuk bersaldo, disebut juga bentuk empat kolom.

Menurut Rahman Pura (2013:45) fungsi dari buku besar adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat secara terperinci setiap jenis harta, uang dan modal serta perubahannya (transaksi/kejadian).
- b. Menggolongkan aspek transaksi atau kejadian sesuai dengan jenis akun masing-masing.
- c. Menghitung jumlah atau nilai dari tiap-tiap jenis akun.
- d. Mengikhtisarkan akuntansi ke dalam akun yang terkait, sehingga dapat menyusun laporan keuangan.

Sedangkan buku pembantu digunakan apabila terdapat jumlah akun yang sangat besar dengan karakteristik yang sama. Setiap buku besar pembantu diwakili dalam buku besar umum oleh sebuah akun perangkum yang disebut akun pengendali (*controlling account*). Hasil penjumlahan atas saldo buku besar pembantu harus sama dengan saldo pada akun pengendali yang bersangkutan.

d) Penyusunan neraca saldo

Menurut Suradi (2009:70) neraca saldo adalah :

Suatu daftar dari seluruh akun dan saldonya pada saat tertentu dan biasanya neraca saldo disusun pada akhir suatu periode akuntansi.

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:24) neraca saldo adalah:

Neraca yang memuat semua perkiraan, tetapi yang dimaksudkan neraca saldo akhirnya saja.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:24) Manfaat dari neraca saldo sebelum penyesuaian adalah sebagai berikut :

- 1) Mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan karena kita tidak harus membolak-balik buku besar.
- 2) Menguji apakah pencatatan kedalam seluruh rekening sudah benar debit maupun kreditnya.
- 3) Mengetahui saldo pos-pos laporan keuangan dalam satu halaman sehingga dapat dipelajari hubungan antara pos yang satu dan yang lainnya secara mudah (berguna untuk melakukan penyesuaian).

e) Penyusunan Jurnal Penyesuaian

Penyesuaian berarti pencatatan atau pengakuan (jurnal dan posting) data-data transaksi tertentu pada akhir periode sehingga jumlah rupiah yang dapat dalam tiap rekening menjadi sesuai dengan kenyataan pada akhir periode tersebut dan laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan keadaan yang senyatanya pada tanggal laporan neraca. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2008 :105), jurnal penyesuaian adalah :

Jurnal untuk mencatat kejadian-kejadian yang tidak mempunyai dokumen khusus seperti tanda terima, bukti pengeluaran kas, atau faktur penjualan. Dicatat pada akhir periode akuntansi dengan jurnal penyesuaian. Maksud dan tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk mengubah sisa perkiraan hingga menggambarkan secara wajar situasi pada akhir periode.

Berikut ini adalah pos-pos perkiraan yang memerlukan penyesuaian menurut Wiwin Yadiati dan Ilham Wahyudi (2008:96) :

1. Beban yang ditangguhkan (*deferred expenses*) atau beban dibayar dimuka (*prepaid expenses*). Pos ini pada awalnya dicatat sebagai aktiva dan dikemudian hari dialikasikan sebagai beban seiring operasi normal perusahaan. Contohnya, perlengkapan dan asuransi dibayar dimuka.
2. Pendapatan yang ditangguhkan (*diferend revenues*) atau pendapatan diterima dimuka (*unearned revenues*). Pos ini pada awalnya dicatat sebagai kewajiban dan dikemudian hari diakui dan dicatat sebagai pendapatan. Contohnya, sewa dibayar dimuka.
3. Beban akrual atau beban yang masih harus dibayar (*accrued expenses*) atau kewajiban akrual, yaitu beban yang terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan. Contohnya, upah karyawan yang terhutang dan harus dibayar pada akhir periode.
4. Pendapatan akrual atau pendapatan yang masih harus diterima (*accrued revenue*) atau aktiva akrual, yaitu pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat dalam perkiraannya. Contohnya, imbalan jasa akuntan yang telah diberikan kepada klien namun belum ditagih kepada klien pada akhir periode.

f) Neraca saldo setelah penyesuaian

Setelah pembuatan jurnal penyesuaian selesai, maka langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dengan cara mencari saldo-saldo rekening-rekening buku besar setelah posting jurnal penyesuaian dilakukan. Setelah

penyesuaian neraca saldo, maka proses selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Namun kadang kala muncul kesulitan saat akan melakukan penyusunan laporan keuangan sehingga akuntansi menyediakan alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan yang dikenal dengan sebutan neraca lajur atau kertas kerja.

Menurut Evi Maria (2007:110) yang dimaksud dengan neraca lajur adalah sebagai berikut :

Suatu kertas kerja yang berisi kolom atau lajur yang dirancang berisi rangkuman rekening-rekening dan saldonya yang tercantum dalam neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian.

g) Penyusunan laporan keuangan

Menurut Soemarso S.R (2009:34) laporan keuangan (*financial statement*) adalah :

laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Pada umumnya penyusunan laporan keuangan terdiri dari : laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas, serta dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Laporan laba rugi

Laporan laba rugi adalah suatu ikhtisar pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu.

Menurut Suradi (2009:38) laporan laba rugi (*income statement*) adalah :

Ikhtisar pendapatan (*revenues*) dan beban (*expenxe*) selama satu periode tertentu, misalnya setengah tahun atau setahun.

2) Laporan ekuitas pemilik

Menurut Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr. (2007:19) :

Laporan ekuitas pemilik adalah Perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu seperti satu bulan atau satu tahun yang kenaikan ekuitas pemilik berasal dari investasi pemilik dan laba bersih (pendapatan melebihi beban) sedangkan penurunan ekuitas pemilik diakibatkan oleh penarikan pemilik dan rugi bersih (beban melebihi pendapatan).

Perhitungan yang umum dari laporan ekuitas pemilik adalah dengan menambah laba usaha pada periode tersebut dengan modal awalnya kemudian dikurangi dengan pengambilan prive oleh pemilik. Selisihnya merupakan modal akhir pemilik pada periode tersebut.

3) Neraca

Menurut Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr (2007:19) :

neraca adalah Suatu daftar aktiva, kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu, biasanya pada akhir bulan atau pada akhir tahun. Biasanya disebut juga dengan laporan posisi keuangan (*statement of financial position*).

4) Laporan arus kas

Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr. (2007:19). Laporan arus kas adalah :

laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas.

5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan-catatan yang dianggap penting dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan perusahaan sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009 : 1) catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

h) Pembuatan Jurnal Penutup (*closing entries*)

Menurut Soemarso (2009:134) ayat jurnal penutup pada hakikatnya adalah :

ayat jurnal untuk me-nol-kan saldo akun-akun sementara apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya.

Menurut Soemarso (2009:134-135) ada empat tahapan yang diperlukan untuk melakukan jurnal penutup, yaitu :

1. Penutupan akun pendapatan

Semua akun pendapatan di debit sebesar masing-masing saldonya. Akun ikhtisar laba rugi di kredit dengan jumlah saldo akhir akun-akun tersebut. Dengan pendebitan ini, akun-akun pendapatan akan menjadi nol.

2. Penutupan akun beban

Semua akun beban di kredit sebesar masing-masing saldo akhirnya dan akun ikhtisar laba rugi di debit sebesar jumlah saldo akhir akun-akun tersebut. Dengan pengkreditan ini semua akun beban akan bersaldo nol.

3. Penutupan akun ikhtisar laba rugi

Selisih antara jumlah sisi kredit dengan jumlah sisi debit pada akun ikhtisar laba rugi dipindahkan ke akun modal. Apabila memperoleh laba, sisi kredit akun ikhtisar laba rugi akan lebih besar dibandingkan dengan sisi debitanya. Untuk memindahkan laba ke akun modal, akun ini di debit sebesar selisih antara jumlah sisi kredit dan sisi debit, akun modal di kredit dengan jumlah yang sama. Apabila perusahaan menderita rugi pemindahan berlaku sebaliknya.

4. Penutupan akun prive

Akun prive di kredit sebesar saldo akhirnya dan akun modal di debit dengan jumlah yang sama.

i) Neraca saldo setelah penutupan (*post closing trial balance*)

Menurut Eart K. Stice, James D. Stice dan K. Fred Skousen (2009:64) Neraca saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut :

Neraca yang memastikan kesamaan atau keseimbangan debit dan kredit setelah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup diposting.

Sedangkan Warren, dkk (2008:172) mendefinisikan neraca saldo setelah penutupan yaitu :

Neraca saldo untuk memastikan bahwa buku besar berada dalam keadaan seimbang pada awal periode berikutnya atau neraca saldo yang disusun setelah semua akun sementara (akun nominal) ditutup.

j) Jurnal Pembalik (*reversing entries*)

Soemarso S. R (2009:250) mendefinisikan jurnal pembalik (*reversing entries*) adalah :

Jurnal yang dibuat pada awal periode sebagai kebalikan dari sebagai jurnal penyesuaian pada akhir periode sebelumnya. Jurnal ini bersifat opsional namun jika dilakukan memberikan manfaat. Tidak semua ayat jurnal penyesuaian dilakukan *reversing entries*.

Menurut Soemarso S. R (2009:253) ada empat macam jurnal penyesuaian yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu :

1. Beban masih harus dibayar (*accrued expenses*)
2. Beban dibayar dimuka (*prepaid expenses*), apabila beban tersebut mula-mula dicatat pada akun beban (bukan akun aktiva)
3. Pendapatan masih harus diterima (*accrued revenues*)
4. Pendapatan diterima dimuka (*unearned revenues*), apabila pendapatan tersebut mula-mula dicatat pada akun pendapatan (bukan akun utang)

4. **Konsep Akuntansi Untuk Usaha Kecil**

Pada dasarnya konsep akuntansi yang digunakan perusahaan besar sam halnya dengan konsep akuntansi yang digunakan dan ditetapkan perusahaan kecil, hanya saja ada perbedaan dari segi pencatatan yang digunakan oleh keduanya.

a) Pembukuan dan Akuntansi

Menurut Rudianto (2009:4) pembukuan adalah :

Aktivitas pencatatan data usaha suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu.

Sedangkan akuntansi menurut Rudianto (2009:4) adalah :

Aktivitas pada desain sistem pencatatan, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang ada, dan menginterpretasikan laporan tersebut.

Dalam hal ini perbedaan akuntansi perusahaan kecil dan perusahaan besar hanya terletak dari segi pencatatan akuntansinya saja, akan tetapi secara keseluruhan pengelolaan antara perusahaan kecil dan besar tersebut hampir sama pada setiap perusahaan.

b) Sistem Akuntansi Usaha Kecil

Sistem akuntansi yang dilakukan oleh usaha kecil masih bersifat sederhana dan sistem yang digunakan yaitu sistem akuntansi tunggal (*single entry system*).

Nunuy Nurarfiah (2009:6) ada dua sistem pencatatan akuntansi :

- 1) Sistem pencatatan tunggal (*single entry system*)
Sistem pencatatan *single entry system* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal (tidak berpasangan).
- 2) Sistem pembukuan berpasangan (*double entry bookkeeping*)
Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan (double = berpasangan, entry = pencatatan), pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal.

5. Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah (EMKM)

Di pertengahan tahun 2015 IAI menyusun pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih sederhana dari SAK ETAP yaitu SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Beberapa riset yang pernah dilakukan juga menemukan

bahwa masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mampu menyusun laporan keuangan dengan baik karena standar akuntansi yang ada masih terlalu sulit sehingga belum dapat diterapkan oleh UMKM walaupun persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam SAK EMKM masih didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari Rerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana yang kita pelajari dalam SAK Konvergensi IFRS. Entitas yang laporan keuangannya telah menggunakan SAK EMKM sebagai pedoman, maka entitas membuat secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, tentunya kepatuhan ini dapat dilihat jika entitas benar-benar telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM ini secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang serupa.

Sesungguhnya EMKM merupakan suatu bagian dari kondisi ekonomi di suatu negara. Tak terkecuali EMKM yang begitu berperan terhadap perekonomian Indonesia. Bahwa, di negeri ini EMKM memiliki jumlah yang lebih banyak daripada perusahaan terbuka. Hal ini terbukti pada saat krisis moneter tahun 1997-1998, terbukti bahwa EMKM adalah penolong bagi Indonesia dalam stabilisasi keadaan ekonomi yang ada. Tidak hanya itu, EMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja yang mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan. Hal ini sesuai dengan UU No 2 Tahun 2008 Bab III Pasal V yang berbunyi:

meningkatkan peran usaha mikro, kecil, menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam hal pemisahan kepentingan, dalam SAK EMKM perlu dipisahkan secara jelas antara entitas bisnis dan entitas lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Konsep Entitas Bisnis. Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan suatu standar yang paling sederhana, sehingga entitas yang memenuhi persyaratan EMKM perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan. Misalnya SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Sehingga teknik pengukuran biaya persediaan digunakan metode biaya standar atau metode eceran demi mendapatkan kemudahan. Hal-hal lainnya yang terdapat dalam SAK EMKM ini adalah mengenai saling hapus. Saling hapus aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban, tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK EMKM. Misalnya, Jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap secara neto. Dalam menyajikan Laporan Keuangan, entitas menyajikan secara wajar informasi yang diungkapkan untuk mencapai tujuan relevan, representatif yang tepat, keterbandingan dan keterpahaman dengan penyajian informasi yang komparatif. Informasi komparatif yang dimaksud adalah informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh laporan keuangan periode berjalan.

Laporan keuangan yang disajikan sebagaimana yang diatur dalam SAK EMKM ini adalah Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode , Laporan Laba Rugi selama periode dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. Informasi yang perlu ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut antara lain, nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan, tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan, satuan mata uang penyajian yakni rupiah dan pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Perlakuan khusus dalam Laporan Laba Rugi, misalnya dalam SAK EMKM ini mengatur bahwa jika dalam koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi terdapat dampak yang muncul, maka atas dampak ini tidak dianggap sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Yang perlu menjadi perhatian, SAK EMKM ini juga mengatur transaksi yang khusus, contohnya transaksi dalam mata uang asing, pendapatan hibah, investasi pada ventura bersama, dan perubahan kebijakan akuntansi sehingga dapat disimpulkan bahwa SAK EMKM ini telah mencakup hal- hal yang dibutuhkan oleh pengguna standar ini. Oleh karena itu, UMKM sebagai pengguna, perlu mempersiapkan diri untuk penggunaan SAK EMKM, walaupun berlaku efektif per 1 Januari 2018 namun perlu diketahui bahwa penerapan dini diperkenankan.

6. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Menurut SAK ETAP (2009:1) standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*) bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Menurut SAK ETAP (2009:17) Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

1. Entitas telah menggunakan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan bursa efek dipasar modal; atau
2. Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat , seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investas.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah

besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAK ETAP 2009:2).

b. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian yang wajar dari laporan keuangan SAK ETAP antara lain dijelaskan dalam sub sebagai berikut (SAK ETAP 2009:14-18) :

1) Penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, kewajiban, penghasilan dan beban.

2) Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit an unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

3) Kelangsungan usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha.

4) Frekuensi laporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali.

5) Penyajian yang konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam pelaporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali jika terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.

6) Informasi komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan).

7) Matrealitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

8) Laporan keuangan lengkap

Laporan keuangan entitas meliputi:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan :
 - Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik:
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

c. Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut.

d. Ketentuan Transaksi

Entitas menerapkan SAK ETAP secara prospektif, namun jika tidak pantas, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara prospektif. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka :

- a) Mengakui semua asset dan kewajiban yang pengakuannya, dipersyaratkan dalam SAK ETAP.
- b) Tidak mengakui pos-pos sebagai asset, kewajiban jika SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan tersebut.
- c) Klasifikasian pos-pos yang diakui suatu jenis asset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis asset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP
- d) Menerapkan SAK ETAP dalam pengakuan seluruh asset dan kewajiban yang diakui.
- e. Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neracanya berdasarkan SAK ETAP mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK ETAP diakui.

7. Peran akuntansi bagi UKM

Informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil (Magginson et al. 2000). Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambil keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain. Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga diperlukan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi usaha kecil dari kreditur. Kewajiban penyelenggaraan akuntansi bagi usaha kecil sebenarnya telah terkandung dalam undang-undang usaha kecil No.9 tahun 1995 dalam undang-undang perpajakan. Pemerintah maupun komunitas akuntansi telah menegaskan pentingnya pencatatan dalam penyelenggaraan akuntansi bagi usaha kecil.

Adanya SAK ETAP merupakan cerminan upaya untuk mempermudah UKM dalam menyusun laporan keuangan. Hal yang baru, tentu akan menimbulkan pro dan kontra, dari sinilah peneliti ingin mengetahui bagaimana pengusaha UKM dalam menyikapi hal tersebut, tetap membuat laporan keuangan yang sederhana atau beralih pada laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh usaha dagang karet di kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota belum sesuai dengan konsep-konsep dasar akuntansi.